

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno, 2006).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pembangunan antarwilayah (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut (Arsyad, 1997). Selama tiga dasawarsa perhatian utama pembangunan pada cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan Nasional, baik negara maju atau kaya maupun negara terbelakang atau miskin, baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui bahwa suatu keberhasilan program pembangunan di negara berkembang sering dimulai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad, 1999).

Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus

menjadi alat untuk mengurangi/ketimpangan regional (Majidi, 1997). Menurut Sukirno (2004), salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian pada suatu wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui PDRB dan PDRB per kapita.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam 6 tahun terakhir Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta memiliki rata-rata laju pertumbuhan yang paling tinggi adalah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 7,31%, dan laju pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar 4,73%. Sedangkan Kabupaten Sleman memiliki rata-rata laju pertumbuhan yang tertinggi kedua yaitu sebesar 5,45%. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Sleman harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel.1.1
Laju Pertumbuhan PDRB (%)
Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan
2010 Tahun 2010-2016

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	Kab.Bantul	Kab.Gunung Kidul	Kab.Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
2010	5,02	4,50	7,53	5,30	5,50
2011	5,07	4,52	8,86	5,42	5,84
2012	5,33	4,84	7,88	5,79	5,40
2013	5,46	4,97	6,15	5,89	5,47
2014	5,04	4,54	7,37	5,3	5,29
2015	4,97	4,82	5,44	5,18	5,09
2016	5,06	4,89	7,92	5,25	5,11
Rata-rata	5,14	4,72	7,31	5,45	5,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian Yunisti (2012) dampak positif dari ketimpangan wilayah adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya agar meningkatkan kesejahteraannya dan juga mendorong mobilisasi tenaga kerja dari wilayah yang tinggi ketimpangannya ke daerah dengan ketimpangan rendah.

Tabel 1.2
PDRB Antar Kecamatan Kabupaten Sleman
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kecamatan	PDRB (Rupiah) Tahun		Rata-rata
		2014	2015	
1	Moyudan	Rp 641.653	Rp 641.475	Rp 641.564
2	Minggir	Rp 590.765	Rp 615.795	Rp 603.280
3	Seyegan	Rp 1.118.409	Rp 1.171.774	Rp 1.145.092
4	Godean	Rp 1.780.837	Rp 1.875.631	Rp 1.828.234
5	Gamping	Rp 2.189.707	Rp 2.309.814	Rp 2.249.761
6	Mlati	Rp 2.242.940	Rp 2.371.904	Rp 2.307.422
7	Depok	Rp 4.723.543	Rp 5.007.316	Rp 4.865.430
8	Berbah	Rp 975.806	Rp 1.027.995	Rp 1.001.901
9	Prambanan	Rp 1.096.448	Rp 1.146.674	Rp 1.121.561
10	Kalasan	Rp 1.599.240	Rp 1.686.862	Rp 1.643.051
11	Ngemplak	Rp 1.202.121	Rp 1.266.734	Rp 1.234.428
12	Ngaglik	Rp 2.232.062	Rp 2.359.342	Rp 2.295.702
13	Sleman	Rp 2.878.070	Rp 3.033.358	Rp 2.955.714
14	Tempel	Rp 871.451	Rp 916.304	Rp 893.878
15	Turi	Rp 518.071	Rp 542.544	Rp 530.308
16	Pakem	Rp 1.480.530	Rp 1.537.448	Rp 1.508.989
17	Cangkringan	Rp 625.887	Rp 649.300	Rp 637.594

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Data yang bersumber dari BPS Kabupaten Sleman tahun 2015 yaitu PDRB antar kecamatan Kabupaten Sleman atas dasar harga konstan 2010 rata-rata PDRB paling tinggi dibanding dengan kecamatan lain yaitu kecamatan Depok sebesar Rp 4.865.430. Sedangkan terendah yaitu berada di Kecamatan Turi yaitu sebesar Rp 530.308. Perbedaan nilai PDRB yang dimiliki oleh masing - masing kecamatan disebabkan oleh perbedaan potensi yang dimiliki. Perbedaan nilai PDRB di masing-masing kecamatan menandakan terjadinya ketimpangan antar kecamatan. Pola pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh visi dan misi dari masing-masing daerah. Adapun visi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Terwujudnya pembangunan regional

sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan” (Restiatun, 2009).

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari pengeluaran pada keseimbangan umum suatu perekonomian. Proses yang mempengaruhi alokasi sumber daya terutama melalui kapital market, melalui sistem politik dan juga melalui kondisi sosial. Pada suatu masyarakat yang tingkat kesenjangannya tinggi cenderung membuat orang-orang miskin tidak dapat menikmati tingkat pendidikan yang baik, kurang mendapatkan akses terhadap kredit atau asuransi sehingga tidak dapat memaksimalkan kemampuan potensial produktif yang dimiliki (Waluyo, 2004).

Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Maka apabila pendapatan antar daerah tinggi dan merata, tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah juga akan kecil.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka sangat menarik untuk menganalisis **“Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing–masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan jika setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Development Region*) dan daerah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata PDRB antar kecamatan di Kabupaten Sleman yang tertinggi pada Kecamatan Depok yaitu sebesar Rp.4.865.430. Sedangkan rata-rata PDRB yang terendah pada Kecamatan Turi yaitu sebesar Rp.530,308. Dari Tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa adanya ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Sleman yang cukup tinggi.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diambil pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan wilayah ekonomi di Kabupaten Sleman?
2. Apakah hipotesis Kuznet tentang kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian adalah:

1. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan wilayah ekonomi di Kabupaten Sleman.
2. Menguji hipotesis Kuznet tentang kurva U terbalik berlaku atau tidak di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Supaya masyarakat dapat memahami kondisi pertumbuhan pembangunan khususnya di Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan arah dan

strategi pembangunan di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam pelaksanaan pemerataan ekonomi daerah seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman.

3. Peneliti

Semoga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk memberikan kontribusi yang positif bagi peneliti sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek yang sesungguhnya.